

Ketua DPRD Kab. Cirebon Minta Pendidikan Jadi Perhatian Bersama

CIREBON (IM)- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi menilai, sejauh ini banyak permasalahan pendidikan di daerahnya yang perlu diperbaiki. Mulai dari kuantitas hingga kualitas pendidikan.

Dia menilai, tingkat kelulusan siswa SMP di Kabupaten Cirebon setiap tahunnya berjumlah sekitar 27 ribu anak.

Dari jumlah tersebut, yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA hanya sekitar 20 ribu siswa saja.

"Atas data tersebut tentunya menjadi permasalahan pendidikan yang harus dirunut akar permasalahannya. Sehingga angka ideal kelulusan dari mulai SD hingga SMA di Kabupaten Cirebon minimal bisa merata," kata Luthfi, Minggu (19/6).

Ia menyebutkan, atas kondisi itu tentunya permasalahan pendidikan di Kabupaten Cirebon secara bertahap harus terus diperbaiki.

Mulai dari kuantitas hingga kualitas kependidikan yang harus menjadi perhatian bersama.

Politisi PKB ini melanjutkan, jumlah partisipasi anak yang sekolah di jenjang SD dari kelas 1 hingga 6 yang ada di Kabupaten Cirebon sekitar 199 ribu siswa.

Dari jumlah itu, tingkat kelulusan kelas 6 SD berkisar 33 ribu siswa.

Kemudian yang melanjutkan ke jenjang SMP hanya 27 ribu anak serta yang melanjutkan ke SMA 20 ribu siswa saja.

"Masalah tersebut in-

dikatornya lumayan pelik. Mulai dari faktor kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya pendidikan. Juga jangkauan sekolah yang menjadi pertimbangan orang tua murid dalam memasukan calon siswa," ungkapnya.

Terpenting lanjutnya, adalah kesadaran bersama agar bisa bersinergi dalam memberikan support positif dalam kemajuan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Upaya yang ditempuh DPRD Kabupaten Cirebon sendiri, kata dia, tahun ini sedang merintis untuk membangun tiga sekolah baru tingkat SMA.

"Untuk rintisan SMA Negeri Depok, aplilatornya numpang sementara di SMA Negeri 1 Jombang. Dan untuk SMA Negeri 1 Tengahtani aplilatornya di SMA Tengahtani," terangnya.

Dia menambahkan, untuk transisi tahun pertama teknisnya masih menginduk di SMP Negeri masing-masing kecamatan.

Agar pencapaian ideal jumlah sekolah dan peserta didik seimbang tentunya harus sesuai.

Sehingga strategi dan cara jalan keluar masalahnya yakni penambahan rombongan dan penambahan unit sekolah baru.

"Dari jumlah 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon yang memiliki sekolah SMA Negeri baru 20 kecamatan saja.

Ini agar blankspot dari jumlah kecamatan yang belum memiliki sekolah untuk terus diinisiasi, sehingga pemerataan sekolah bertahap bisa direalisasikan," tukasnya. ● pra

Oteu Herdiansyah SH Siap Majukan Peradi Kab. Bogor



Oteu Herdiansyah Deklarasi Pencalonan Ketua DPC Peradi Kabupaten Bogor.

BOGOR (IM) - Masalah hukum di wilayah Kota Tegar Beriman, Kabupaten Bogor di masa mendatang akan semakin kompleks.

Untuk itu dibutuhkan figur visioner dan pendobrak bagi perhimpunan pembela peradilan yang tergabung di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Oteu Herdiansyah SH, merupakan salah satu sosok muda yang visioner yang akan mendobrak paradigma lama untuk mencalonkan diri sebagai salah satu calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Cibinong Kabupaten Bogor periode 2022-2027 pada Musyawarah Cabang (Muscab) II nanti.

Tekad ini disampaikan, Oteu Herdiansyah, SH saat gelaran silaturahmi menanggapi pertanyaan pers, di rumah makan Bumi Aki, pekan lalu.

Selain itu, jika dirinya terpilih nanti akan langsung tangcap gas membenahi kebutuhan organisasi yang dianggap krusial untuk segera ditangani, seperti menyiapkan Sekretariat yang representatif dan membangun konsolidasi dengan berbagai stakeholder, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.

"Untuk lokasi calon kantor sekretariat sudah saya siapkan di area pusat kota Cibinong, karena kantor Sekretariat yang representatif itu penting untuk disiapkan agar kegiatan dan eksistensi Peradi DPC Kabupaten Bogor di Cibinong semakin baik," jelas Oteu panggilan akrabnya.

Oteu Herdiansyah telah melakukan konsolidasi menjelang Muscab II DPC Peradi Kabupaten Bogor periode 2022-2027 mendatang.

Bahkan lanjut Oteu Herdiansyah, pihaknya siap

dan akan all out untuk pencalonan diri sebagai calon Ketua DPC Peradi Kabupaten Bogor nanti.

Demi memajukan Peradi, saya siap dan semakin mantap mengikuti kontestasi pemilihan Ketua DPC Peradi Kabupaten Bogor periode 2022-2027 pada Muscab II yang bakal digelar di Ballroom Bigland Sentul pada 26 Juni 2022 mendatang," tegasnya.

Ketua Bidang PBH DPC Peradi Kabupaten Bogor ini menegaskan, demi kemajuan organisasi Peradi, siapapun lawan yang akan dihadapi, saya siap," tukasnya.

Pada acara silaturahmi dan konsolidasi calon ketua DPC Peradi Kabupaten Bogor, di RM Bumi Aki Cibinong itu dihadiri sekitar 40 anggota termasuk ketua saat ini Herdian Nuryadin SH.

"Insy Allah, saya optimistis dan menargetkan, 170 suara dari 230 anggota. 99 % saya yakin menang, 1 % nya takdir," tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Pakuan (Unpak) Bogor yang berprofesi Advokat sejak 2016 ini.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua DPC Peradi, Herdian Nuryadin SH, menyatakan dukungan penuh terhadap pencalonan Oteu yang dinilainya bakal mampu membawa perubahan organisasi kearah yang lebih baik.

"Pada prinsipnya saya sangat mendukung dan mendukung kelancaran Muscab II pada tanggal 26 Juni 2022. Mudah-mudahan Ketua terpilih bakal amanah sesuai dengan harapan rekan-rekan anggota DPC Peradi Cibinong. Siapa pun yang jadi saya harus mendukung penuh kepemimpinannya, berarti itu yang terbaik untuk DPC Peradi Cibinong," pungkasnya. ● gio

8 | Nusantara



KUNJUNGAN GUBERNUR JAWA TIMUR DI SIDOARJO

Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (PP Muslimat NU) sekaligus Gubernur Jawa Timur Khoffah Indar Parawansa (kedua kiri) membeli produk unggulan sesuai acara pelantikan Pengurus Cabang Muslimat NU di Gedung Rohmatul Ummah An Nahdliyah, Bluru, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (19/6).

Hampir Selesai, Proyek Tembok Antilongsor Cilebut Ambrol

Pembangunan TPT ini sangat ditunggu warga. Sebab, tebing Jalan Raya Cilebut yang di bawahnya merupakan aliran Sungai Kali Baru dikhawatirkan longsor. Jalur ini juga merupakan jalur penting karena menjadi akses utama menuju Stasiun Cilebut dan jalur yang menghubungkan wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

BOGOR (IM) - Tembok antilongsor yang tengah dibangun di Jl. Raya Cilebut,

Kelurahan Sukaesmi, Kecamatan Tanahsareal, Kota Bogor, ambrol. Material Tembok

Final Putri Otonomi, Menutup HUT APKASI

BOGOR (IM) - Final pemilihan Putri Otonomi Indonesia menjadi agenda penutup malam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Kegiatan dilaksanakan di Vimala Ballroom Hotel Pullman Vimala Hills, Ciawi, Kabupaten Bogor Sabtu (18/6).

Kabupaten Bogor tahun ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan peringatan HUT APKASI ke-22.

Sebagai informasi, juara pertama pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2022 adalah, Kabupaten Tapanuli Utara. Runner Up 1 yakni Kabupaten Kebumen, Runner Up 2 Kabupaten Banyumas, dan Runner Up 3 Kabupaten Bandung, dan menjadi juara favorit.

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, mewakili Pemerintah Kabupaten Bogor dirinya mengucapkan terima kasih sudah menjadikan Kabupaten Bogor jadi tuan rumah Rakernas APKASI ke-22, dan HUT APKASI ke-22, serta pemilihan Putri Otonomi Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Bogor berharap kedatangan delegasi pemerintah kabupaten dari seluruh tanah air, dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan berdampak pada kebangkitan sektor pariwisata dan UMKM di Kabupaten Bogor.

"Kami semua menyambut gembira kedatangan delegasi

APKASI dan Putri Otonomi Indonesia. Kami mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penyambutan dan penerimaan kami," ungkap Iwan.

Soal pemilihan Putri Otonomi Indonesia, Iwan menjelaskan, Putri Otonomi Indonesia ini adalah putri terbaik dari seluruh Indonesia, semoga kegiatan ini bisa meningkatkan keharmonisan budaya di nusantara.

"Bisa mempromosikan potensi daerah, mengawal otonomi daerah dan saling berkolaborasi dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Presidensi G-20 di Indonesia," ucap Iwan Setiawan.

Berikutnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo menyebutkan, di usia yang ke-22 tahun ini, saya memberikan apresiasi kepada segenap jajaran APKASI atas segala upaya pada pembangunan di daerah masing-masing. Semoga momentum ini semakin memantapkan komitmen dan eksistensi APKASI untuk mewujudkan visi dan misinya.

APKASI hadir melalui deklarasi pemerintah daerah kabupaten pada tanggal 30 Mei 2000 di Jakarta. APKASI terus tumbuh dan menjadi asosiasi pemerintah daerah terbesar dengan 416 anggota, yang berasal dari seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia.

Dengan tujuan yang sama yaitu mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik

Indonesia.

"Saya berharap para bupati sebagai bagian dari APKASI dapat mendukung upaya pemulih ekonomi nasional melalui terobosan kreatif dari bidang layanan seperti sektor pertanian, perikanan dan yang lainnya, untuk menambah pendapatan daerahnya masing-masing," terang John Wempi.

Wamendagri juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Dia berharap para Putri Otonomi Indonesia dapat mendukung program APKASI untuk mendorong pembangunan daerah, mempromosikan berbagai potensi unggulan daerah masing-masing seperti pariwisata, produk unggulan daerah dan lain-lain, juga menjadi penyambung lidah APKASI terutama untuk kalangan millennial.

"Putri Otonomi Indonesia adalah role model para generasi muda Indonesia yang di masa depan akan menjadi pilar dan penggerak otonomi daerah," tandas John Wempi.

Ketua Umum APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menuturkan, sebagai ketua umum ia mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22, semoga APKASI semakin baik ke depan.

"Kekompakan adalah tujuan utama bagi kita untuk menyalurkan aspirasi kita di 416 kabupaten di seluruh Indonesia. APKASI adalah penyambung lidah dari daerah kepada pemerintah pusat," tutur Sutan. ● gio

Penahan Tanah (TPT) yang hampir jadi ini kini menumpuk di dasar tebing dan menutup sebagian aliran sungai.

Pantauan di lapangan, Minggu (19/6), tampak material tembok antilongsor sudah menumpuk di dasar tebing. Material longsor berupa batu kali berukuran besar bercampur semen yang sebelumnya dipasang di dinding tebing.

Bagian atas tebing yang longsor, kini sudah ditutupi terpal berwarna biru. Hingga saat ini, material longsor belum dievakuasi dan dibiarkan menutup sebagian aliran Sungai Cipakancilan yang

mengalir hingga Jakarta itu.

"Benar pak, TPT-nya longsor. Padahal sudah hampir jadi itu, tapi longsor lagi. Kalau korban Alhamdulillah nggak ada ya. Cuma disayangkan saja itu (TPT) sudah hampir jadi tapi longsor lagi," kata Kepala Seksi Irgasi UPID Pengelola Sumber Daya Alam (PSDA) Jawa Barat, Yulianti Juhendah, saat dimintai konfirmasi Minggu (19/6).

Yulianti mengatakan, longsor terjadi pada Sabtu (18/6) siang. Tembok antilongsor itu ambrol ketika proyek pembangunannya sudah mencapai 90 persen. Pihak PSDA kini masih berkoordinasi dengan pelaksana proyek untuk mengetahui penyebab ambrolnya tembok tersebut.

"Kejadiannya kemarin, jam 2-an ya, kondisi hujan sedikit informasinya, itu pun sebelum longsor. Itu kan sudah hampir jadi, terakhir kami monitor Hari Jumat, eh besoknya (18/6) longsor lagi," kata Yulianti.

"Kalau informasi terakhir itu kan sudah hampir 90 persen

proses pembangunannya. Kita juga masih cari penyebabnya, karena itu kan sudah hampir jadi. Sore ini kita masih rapat, kita juga koordinasi sama pihak ketiga yang melaksanakan proyek. Kita perlu detailnya, kejadiannya seperti apa dan penyebabnya kira-kira apa," tambahna.

Diketahui, pembangunan TPT ini sangat ditunggu warga. Sebab, tebing Jalan Raya Cilebut yang di bawahnya merupakan aliran Sungai Kali Baru dikhawatirkan longsor. Jika tidak diantisipasi dengan TPT, longsor akan mengganggu akses Jalan Raya Cilebut.

Jalur ini merupakan jalur penting karena menjadi akses utama menuju Stasiun Cilebut dan jalur yang menghubungkan wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Jalur ini membentang mulai Kelurahan Sukaesmi, Kota Bogor melewati Stasiun Cilebut, Stasiun Bojonggede, dan berujung di kawasan tengah Kota Depok. ● pra

Tim Gabungan Tindak 23 Tempat Usaha yang Gunakan Air Tanah

BOGOR (IM)- Sebanyak 23 tempat usaha yang menggunakan air tanah ditindak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat selama tiga hari operasi gabungan pengawasan di wilayah Kota Bogor.

Operasi penindakan tempat usaha yang menggunakan air tanah dimulai 15 Juni sampai 17 Juni 2020. Dalam operasi kali ini dilibatkan Dinas ESDM Jawa Barat serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, yakni Satpol PP, DLH, Bapenda serta Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.

Kepala Bidang Penegakan Perda dan Pergub pada Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Wardhana mengatakan, ada 23 tempat usaha baik hotel, rumah sakit, showroom dan mal yang diberikan surat teguran hasil operasi gabungan yang menyangkut penggunaan air tanah di Kota Bogor. Rata-rata tempat usaha ini didapati belum memperpanjang izin penguasaan air tanah.

"Pada umumnya yang kami didatangi mengakui bahwa mereka ada yang belum memperpanjang izin, termasuk juga pembayarannya ketika izin habis sampai sekarang belum dilunasi. Ada juga yang diduga menggunakan air tanah tapi air PDAM," ungkap Wardhana saat dihubungi via telpon, Minggu (19/6).

Wardhana memaparkan, tempat usaha yang mendapatkan peringatan umumnya menyatakan akan melakukan pengurusan perizinan termasuk ada juga yang membayar tunggakan pajak. Surat teguran ini berlaku hingga 15 hari kedepan.

"Dari yang melanggar umumnya akan menyelesaikan urusan izin, sementara itu pembayaran tunggakan sesuai pernyataan yang dibuat. Secara normatif kami beri waktu 15 hari kalender dari sejak surat

teguran disampaikan oleh tim gabungan," terangnya.

Wardhana membeberkan, Satpol PP Jawa Barat akan melayangkan surat teguran kembali jika dalam waktu 15 hari tidak ada pengurusan. Sanksi sampai pencabutan izin bisa saja dijatuhkan apabila tempat usaha tersebut masih tetap mengindahkan peringatan berikutnya.

"Nanti kami lihat dalam 15 hari ini sejauh mana responnya, kalau ada yang membandel kami berikan peringatan berikutnya atau tegantung nanti kondisi seperti apa. Iya (sanksi-red) bisa ditutup sumber airnya, atau mungkin bisa pengidalan juga," bebernya. Terpisah,

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Lia Kania Dewi menjelaskan, operasi gabungan pengawasan dengan leading sektor Satpol PP Provinsi Jawa Barat mengacu terhadap Perda Provinsi

Jawa Barat 5/2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pertindangan Masyarakat serta Perda Provinsi Jawa Barat 1/2017 tentang Pengelolaan Air Tanah.

"Pajak air tanah ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor. Tahun 2022 ini, Bapenda Kota Bogor ditargetkan untuk penerimaan pajak air tanah sebesar Rp4,7 miliar," jelasnya.

Lia menerangkan, di Kota Bogor itu penggunaan air tanah sebetulnya tidak terlalu besar. Target satu tahun di APBD kita Rp4,7 miliar. Potensi penerimaan pajak air tanah tersebut dari 97 wajib pajak tercatat saat ini di Bapenda Kota Bogor. Sementara 23 tempat usaha hasil operasi gabungan, sambung Lia,

instansinya belum bisa memungut pajak lantaran belum ada ketetapan nilai perolehan air dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. ● gio



Final Putri Otonomi di Gelaran penutupan HUT APKASI di Kabupaten. Bogor.